

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Bandung adalah sebuah Kota Metropolitan yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung saat ini merupakan pusat dari kegiatan masyarakat bukan saja masyarakat Kota Bandung itu sendiri tapi bagi masyarakat sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Garut, Sumedang, Cirebon dan dari luar Pulau Jawa pun ada banyak masyarakat yang bertujuan ke Kota Bandung untuk menjadi tempat mencari ilmu, mencari rejeki bahkan hanya sekedar untuk pergi wisata. Berbagai kegiatan menarik yang ada di Kota Bandung, baik itu berupa kegiatan pendidikan, fashion, kuliner dan lain-lain menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebab hal inilah yang menjadikan masalah urbanisasi yang tinggi di Kota Bandung. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. (Kamus Besar Bahasa Indonesia;2012) Meningkatnya populasi penduduk akan menjadi beban berat bagi Pemerintahan Kota Bandung, permasalahan utama dalam urbanisasi adalah tata perkotaan berkenaan dengan tempat tinggal atau daya dukung kota untuk membuat lapangan kerja serta merta untuk mata pencarian mereka.

Kondisi ini terjadi akibat sebagian masyarakat melihat bahwa kota-kota besar khususnya Kota Bandung sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal penyediaan mata pencarian. Namun sejalan dengan itu pada era globalisasi ini kondisi dunia modern dan teknologi tinggi menjadikan daya saing sumber daya manusia semakin ketat. Pergerakan pendudukan dari daerah lain tidak akan menjadi masalah bila mereka mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan, sementara masyarakat pendatang relatif hanya berbekal harapan saja. Mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam, pembantu rumah tangga,

tukang becak dan pekerjaan sejenis lainnya. Sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan kehidupan yang layak menjadi terbatas dan semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di perkotaan menimbulkan pengangguran struktural.

Sehingga hasil dari kondisi diatas, pada akhirnya penduduk pendatang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Dimulai dengan membuat pemukiman di lahan-lahan kosong milik Pemerintahan Kota dan untuk mata pencarian mereka akan menggeluti atau memasuki sektor-sektor informal. Sektor informal yang dimaksud adalah “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian (Kamus Besar Bahasa Indonesia;2012)”. Salah satu permasalahan utama bentuk sektor informal yang terjadi di Kota Bandung adalah dampak dari terlalu banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Yang dimaksud dengan PKL adalah pedagang yang melakukan perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum di lahan terbuka maupun tertutup dan menggunakan peralatan bergerak ataupun tidak bergerak. Menurut Saefulloh 2013, “Saat ini lahan kosong di perkotaan sangat jarang ditemui. Sarana dan prasarana yang telah ada seperti Ruang Terbuka Hijau(RTH) dan trotoar bagi pedestrian beralih fungsi menjadi ruang tempat tinggal maupun berjualan PKL, ruang untuk lalu lintas kendaraan dan tempat parkir lahan kosong yang terdapat di perkotaan baik yang di tengah kota maupun di pinggiran kota seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, perdagangan dan Perindustrian yang illegal”.

Gambar 1 dan Gambar 2 adalah salah satu contoh kondisi jalan yang ditimbulkan oleh permasalahan PKL, kedua gambar ini adalah gambar yang diambil pada jalan yang sama yaitu Jalan Kepatihan Kota Bandung tetapi diambil pada tahun yang berbeda. Gambar 1 diambil pada tahun 2013, terlihat pada jalan tersebut trotoar untuk pejalan kaki dan sebagian jalan raya beralih fungsi menjadi

tempat PKL menempatkan lapak atau tempat berjualan. Sehingga kemacetan lalu lintas yang parah pun tidak dapat dihindarkan. Sedangkan pada Gambar 2 diambil pada tahun 2014 kebalikan dari Gambar 1, PKL telah direlokasi ke tempat lain sehingga jalan bersih dari PKL. Trotoar kembali berfungsi seharusnya yaitu untuk pejalan kaki. Keadaan lalu lintas yang sangat lancar.



**Gambar 1 Jl. Kepatihan, Kota Bandung 2013**

(Sumber: <http://www.tribunnews.com/>)



**Gambar 2 Jl. Kepatihan, Kota Bandung 2014**  
(Sumber: <http://infopublik.id/>)

Kenyataan di atas adalah salah satu dari titik-titik kemacetan lainnya yang terjadi akibat PKL di Kota Bandung. Di sisi lain banyak masyarakat yang membutuhkan PKL, karena Pedagang Kaki Lima dianggap menyediakan barang yang relatif murah dan berkualitas. Pemerintah pun merasakan, sektor ekonomi informal ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran, bahkan berfungsi sebagai katup pengaman sosial dari dampak krisis ekonomi. “Pemerintah Kota butuh PKL dan masyarakat juga butuh PKL. Namun aktivitasnya tentunya harus legal. Tidak menyita ruang-ruang publik, tidak di trotoar atau di badan-badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kekumuhan dan ketidak nyamanan” ungkap mantan Wali Kota Bandung, H Dada Rosada dalam amanatnya mengiringi pelepasan eksekusi PKL kawasan Alun-alun Bandung, di Taman Masjid Raya Bandung-Jawa Barat, Jalan Dalem Kaum Bandung, Senin (6/12).

Banyak solusi yang diterapkan Pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan PKL. Pemberian kompensasi agar PKL dari masyarakat pendatang pulang ke kampung halamannya, relokasi tempat dilarang PKL ke tempat yang

diperbolehkan. Tetapi permasalahan PKL tidak pernah selesai akibat banyaknya titik permasalahan di Kota Bandung ditambah munculnya atau kembalinya titik-titik permasalahan PKL di Kota Bandung. Oleh karena itu Pemerintahan Kota harus memikirkan solusi dan bergerak dengan cepat menyelesaikan titik-titik bermasalah sehingga dapat menjaga agar tidak muncul atau bertambahnya titik-titik yang lain.

Untuk dapat bergerak dengan cepat Pemerintah Kota membutuhkan informasi dengan cepat. Tapi jika informasi itu tersedia dalam bentuk pelaporan masih berbentuk kerangka yang rumit hanya akan membuat tindakan menjadi lama karena Pemerintah Kota membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Pemerintahan Kota membutuhkan SIE (Sistem Informasi Eksekutif) yang bisa melaporkan dalam bentuk sederhana namun mencakup seluruh laporan yang ada. Oleh karena itu Penulis bertujuan untuk mengembangkan SIE agar dapat membantu Pemerintah Kota dalam mengambil tindakan yang cepat.

SIE dalam hal ini akan menampilkan informasi dalam bentuk *Dashboard*, sehingga menyediakan informasi yang interaktif, efektif dan efisien. *Dashboard* adalah kumpulan komponen informatif yang dikelompokkan bersama. Komponen informatif itu bisa berupa tabel, grafik, map grafik, meteran atau kombinasi dari semuanya. *Dashboard* SIE untuk PKL ini akan berisi map grafik kepadatan PKL pada jalan-jalan tempat mereka berjualan, informasi grafik pertumbuhan PKL dari waktu ke waktu dan variabel-variabel dominan PKL yang berjualan di jalan-jalan Kota Bandung.

Selain SIE ini memberikan kemudahan informasi pada Pemerintah Kota, SIE untuk PKL akan membantu Pemerintah Kota dalam proses memasukan data. Orang-orang yang melakukan survei ketika di jalan-jalan mereka hanya perlu SMS dalam format tertentu untuk menambahkan PKL dalam data. SMS akan secara otomatis masuk ke dalam database PKL.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana menyampaikan Informasi data PKL dalam bentuk SIE kepada Pemerintah Kota Bandung, sehingga informasi bisa interaktif, efektif dan efisien?
2. Bagaimana cara membangun sistem untuk mempermudah kerja petugas survei sehingga data PKL dapat dengan cepat diakses?

## 1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan ada beberapa batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Data PKL difokuskan hanya di kota bandung.
2. Map Grafik pada SIE akan menggunakan *Google Map's API*.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi kepada Pemerintah Kota tentang data PKL berupa kepadatan jalan-jalan terhadap jumlah PKL dengan grafik map dan grafik dengan tampilan antarmuka yang interaktif sehingga Pemerintah Kota dapat dengan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan.
2. Mempermudah kerja Pemerintahan Kota dalam melakukan survei PKL di jalan-jalan dengan menggunakan *SMS Gateway*, sehingga Petugas Pemerintah yang melakukan survei hanya perlu mengirim SMS untuk dapat memasukan data PKL ke Kota Bandung.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika susunan dalam skripsi ini merupakan gambaran umum yang mencakup format-format skripsi. Sistematika skripsi sebagai berikut.

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi pembahasan masalah secara umum, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi dasar teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Terkait tentang Urbanisasi, Kota Bandung, PKL, SIE, *Google Maps API* dan *SMS Gateway*

### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tahap-tahap pembangunan sistem dan alat serta bahan yang diperlukan dalam pembangunan sistem.

### **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil dari proses pengumpulan data, perhitungan kepadatan PKL terhadap jalan, desain Sistem, rancangan perangkat lunak, implementasi antarmuka dan pengujian sistem.

### **BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan penelitian.